



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

L A P O R A N

BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA KEGIATAN BKSAP SDGs DAY KE PROVINSI BALI
“PERAN STRATEGIS DIPLOMASI PARLEMEN DALAM PERCEPATAN SDGs
DAN PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH”

Gianyar – Bali, 27 September 2021 s.d. 29 September 2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parlemen memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai kekuatan *check and balance*, Parlemen tidak hanya melakukan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, dalam kerangka representasi, melainkan juga fungsi diplomasi. Hal tersebut dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang MD3.

Secara garis besar, diplomasi yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merupakan bagian dari pendekatan Indonesia yang menjalankan diplomasi ganda (*multi-track diplomacy*). Pemerintah dan parlemen bersama-sama menjalankan diplomasi untuk memperkuat peran Indonesia di kancah regional dan global dalam rangka tercapainya kepentingan nasional.

Dalam konteks tugas dan fungsinya, DPR RI melalui BKSAP akan dapat menjalankan fungsi diplomasinya jika mampu menjembatani kepentingan lokal dan tuntutan global. Artinya, untuk menopang fungsi-fungsi diplomasi tersebut, BKSAP perlu juga membangun sinergi dengan berbagai institusi di daerah mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga pihak swasta. Selain itu, BKSAP juga dituntut untuk memahami berbagai persoalan dan isu kedaerahan yang mempunyai hubungan erat dengan konteks global di berbagai bidang, seperti pembangunan berkelanjutan, pariwisata, industri kreatif, digitalisasi, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kegiatan kunjungan kerja BKSAP dalam format BKSAP *SDGs Day* sangat krusial sebagai media parlemen untuk melakukan diseminasi, menyerap aspirasi, dan juga membangun sinergi dengan berbagai pihak di daerah. Tema yang diangkat pada BKSAP *SDGs Day* ke Bali khususnya ke Kabupaten Gianyar adalah Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Percepatan *SDGs* dan Pemulihan Ekonomi Berbasis Keunggulan Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Surat Tugas Nomor 62/D/ST/PD-DN/BKSAP-KSR/09/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Kegiatan BKSAP berdiskusi dengan Pemerintah daerah potensial, Civitas Akademika dan *civil society* tentang peran strategis diplomasi parlemen dalam mendorong percepatan *SDGs* dan pemulihan ekonomi pasca pandemi berbasis keunggulan daerah pada tanggal 27 September 2021 – 29 September 2021.
2. Keputusan Pimpinan BKSAP dalam rapatnya tanggal 15 September 2021 yang menyetujui pelaksanaan kegiatan BKSAP Day ke daerah potensial guna melakukan diskusi dengan pemerintah daerah, civitas akademika dan *civil society* tentang peran strategis diplomasi parlemen paska pandemi dan optimalisasi potensi daerah untuk bersinergi dengan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat global
3. Disposisi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Nomor Agenda 1132 tanggal 20 September 2021 perihal permohonan ijin pelaksanaan kegiatan BKSAP di Daerah
4. Surat Ketua BKSAP kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Nomor PW/12664/DPRRI/IX/2021 tanggal 20 September 2021 perihal permohonan Ijin Pelaksanaan Kegiatan BKSAP Day di Daerah pada tanggal 27 September 2021 - 29 September 2021

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

BKSAP *SDGs Day* ini bermaksud untuk :

1. Melaksanakan diseminasi fungsi, peran, dan tugas BKSAP DPR RI serta *output* yang telah dihasilkan oleh BKSAP DPR RI.
2. Menyerap aspirasi dan ide-ide inovatif dari pemerintah daerah dan berbagai pihak mengenai diplomasi parlemen terutama dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata dan pencapaian *SDGs*.
3. Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan civitas akademika serta masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan diplomasi parlemen untuk kepentingan daerah.
4. Mendorong pemahaman masyarakat untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebelum tahun 2030.

2. Tujuan Kegiatan

Sedangkan tujuan dari BKSAP *SDGs Day* adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah yang dapat dioptimalkan menjadi *national brand* untuk penguatan nilai strategis diplomasi parlemen sekaligus sebagai katalisator pembangunan daerah.
2. Upaya sinergi kedepan antara BKSAP dengan pemerintah daerah dalam diplomasi parlemen untuk mewujudkan kerjasama internasional seperti pembentukan *sister city* atau *sister regency* dengan kota atau kabupaten di luar negeri.
3. Meningkatkan kolaborasi dan harmonisasi pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global melalui peningkatan peran diplomasi parlemen.

E. Susunan Delegasi

Delegasi yang hadir pada pelaksanaan BKSAP *SDGs Day* di Gianyar adalah Pimpinan dan Anggota BKSAP sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Putu Supadma Rudana, MBA | Wakil Ketua BKSAP/Ketua Delegasi/F-PD/A-563 |
| 2. Gilang Dhielafarez, SH., LLM | Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PDIP/ A-179 |
| 3. Ir. Moh. Ichsan Firdaus | Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PGolkar/A-292 |
| 4. Arzeti Bilbina, SE, MAP | Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PKB/A-032 |
| 5. Muslim, SH, MM | Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PD/A-523 |
| 6. H. Hasani Bin Zuber, SIP | Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PD/A-559 |
| 7. Ema Umiyyatul Chusnah | Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PD/A-471 |

F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Sebelum keberangkatan, telah dilakukan sejumlah persiapan teknis dan substansi. Persiapan substansi dilakukan oleh Tenaga Ahli BKSAP dan Tim Rapat mencakup penyiapan bahan presentasi dan narasi, daftar pertanyaan untuk quiz, dan poin-poin intervensi untuk anggota delegasi, serta draft *press release* untuk berita media sosial. Adapun persiapan teknis mencakup pengajuan anggaran, pengurusan dokumen perjalanan, jadwal keberangkatan dan jadwal acara, pembuatan Surat Keputusan dan Surat Tugas, komunikasi dengan pihak Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Provinsi Bali baik secara lisan maupun tertulis, Surat ke Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Provinsi Bali, penyiapan daftar hadir, dan sebagainya.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Agenda

Pelaksanaan kegiatan BKSAP *SDGs Day* di Kabupaten Gianyar – Provinsi Bali ini dilaksanakan dengan mengacu pada agenda kegiatan berikut:

Senin, 27 September 2021

Kedatangan Delegasi di Bandara Ngurah Rai Denpasar

Persiapan Kegiatan (Teknis dan Substansi)

Selasa, 28 September 2021

Delegasi tiba di Kantor Bupati Gianyar

Courtesy Call dengan Bupati Gianyar, Bapak I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P.

Jajaran Pemda Gianyar dan tamu undangan yang terdiri dari perwakilan civitas akademika dan masyarakat memasuki ruang rapat

MC mengumumkan urutan acara

Bapak I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P., Bupati Gianyar menyampaikan sambutan pembukaan dan presentasi singkat tentang Kabupaten Gianyar

Bapak Putu Supadma Rudana, MBA, Wakil Ketua BKSAP, menyampaikan perkenalan Delegasi dan paparan tentang BKSAP Day

MC mengumumkan Sesi Diskusi dan memandu jalannya acara tanya jawab

Sesi Tanya Jawab/Diskusi

Anggota Delegasi BKSAP lainnya turut serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada

Bapak I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P., Bupati Gianyar menutup acara

Acara tukar menukar cinderamata dan foto bersama

Perjalanan darat dari Gianyar ke Bandara Ngurah Rai Denpasar

Rabu, 29 September 2021

Kepulangan Delegasi

B. Situasi Umum Kegiatan

Kegiatan BKSAP *SDGs Day* ini dilaksanakan di Kantor Bupati Gianyar dengan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar beserta jajaran, civitas akademika dan masyarakat khususnya para tokoh seni dan budaya.

Selama berlangsungnya acara, panitia menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut:

- Sebelum memasuki tempat pertemuan, semua peserta dilakukan pengecekan suhu badan, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer
- Para peserta yang hadir diwajibkan mengenakan masker dan berpakaian rapih dan sopan
- Masing-masing peserta mendapatkan *sanitary tool kit*
- Peserta diingatkan secara berkala agar selalu menjaga jarak sesuai peraturan protokol kesehatan
- Tempat duduk peserta diatur berjarak sesuai protokol kesehatan

Delegasi tiba di lokasi pukul 13.15 WITA dan disambut langsung oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P. Setelah acara *Courtesy Call*, selanjutnya kegiatan BKSAP *SDGs Day* dimulai pukul 13.25 WITA dengan dipandu oleh *Master of Ceremony (MC)* dari Bagian Protokoler Kabupaten Gianyar.

Para peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Pemerintah Kabupaten, Civitas Akademika, dan masyarakat, antara lain :

a. Pemerintah Kabupaten

1. Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P.
2. Wakil Bupati Gianyar, A.A Gde Mayun
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya
4. Ketua DPRD, I Wayan Tagel Winarta
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
6. Para Staf Ahli Bupati Gianyar
7. Dinas Pemuda dan Olah Raga
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12. Dinas Komunikasi dan Informasi
13. BPBD Kabupaten Gianyar
14. BAPPEDA dan Litbang

c. *Civil Society*

Tokoh Masyarakat dan Seni Budaya, Prof. I Wayan Dibia

Acara BKSAP Day dibuka langsung oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P. dengan menyampaikan sambutan dan paparan tentang gambaran umum Kabupaten Gianyar. Acara dilanjutkan dengan pengenalan Delegasi dan paparan tentang BKSAP Day oleh Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, selaku Ketua Delegasi. Kemudian diadakan diskusi atau tanya jawab dengan para peserta. Sebelum acara ditutup oleh Bupati Gianyar, dilakukan acara tukar menukar cinderamata.

III. PARTISIPASI DELEGASI

Acara BKSAP Day ini berjalan sesuai susunan acara yang telah dibacakan oleh *Master of Ceremony (MC)* dan pada saat sesi diskusi terjalin komunikasi dua arah sehingga Delegasi BKSAP mendapatkan banyak masukan dari konstituen untuk menjadi referensi dan ditindaklanjuti dalam proses diplomasi parlemen.

1) Sambutan dan paparan singkat tentang Kabupaten Gianyar, oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P.

Bupati Gianyar membuka kegiatan BKSAP *SDGs Day* dan menyampaikan sambutan kepada para Delegasi. Selanjutnya dijelaskan secara singkat gambaran umum Kabupaten Gianyar yang meliputi visi misi dan program prioritas dalam periode pemerintahan 2021-2024. Dalam paparannya, Bupati Gianyar menjelaskan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gianyar dengan APBD sebesar 2,5 Triliun dan PAD sebesar 881 Milyar. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, sebagaimana disebutkan dalam paparan adalah mewujudkan Masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman dan damai, mandiri, berintegritas berlandaskan Tri Hita Karana melalui pola pembangunan nasional semesta berencana. Visi ini selanjutnya dijawantahkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu: 1) membangun pertanian yang efektif dan mandiri, 2) membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya, 3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan, 4) mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi, 5) mewujudkan penguatan Desa Adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, berbudaya dan Agama Hindu, 6) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Dengan luas wilayah 6,53% dari luas Provinsi Bali secara keseluruhan, yaitu 368 km² Kabupaten Gianyar memiliki 3 (tiga) sektor unggulan yang menjadi potensi daerahnya. Ketiga sektor unggulan tersebut yaitu: 1) **Pertanian dalam arti luas**, yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, 2) **Home industry**, yang bermakna usaha di rumah, merupakan tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan, dan 3) **pariwisata**, yang mencakup kegiatan perjalanan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan.

Terpetakan ke dalam 5 (lima) zona pengembangan wilayah, yaitu Gianyar Utara (meliputi Kecamatan Payangan, Tegallalang, dan Tampaksiring), Gianyar Barat (mencakup Kecamatan Ubud), Gianyar Selatan (meliputi Kecamatan Sukawati dan Blahbatuh), Gianyar Tengah/Pusat (meliputi Desa Bedulu dan Pejeng) serta Gianyar Timur (mencakup

Kecamatan Gianyar) Kabupaten Gianyar memiliki sentra dan potensi unggulan wilayahnya masing-masing yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Saat ini pembangunan terus digiatkan di wilayah Kabupaten Gianyar, kendati pandemi Covid-19 membawa dampak tersendiri, baik pada kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat Gianyar. Dasar konsep pendanaan yang dirancang Kabupaten Gianyar untuk proyek-proyek besar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Pembangunan Pasar Sukawati, Pasar Gianyar, Rumah Sakit Payangan, Puspem Payangan, Penataan Pedestarian dan Taman Kota serta yang lainnya secara umum, menurut Bupati Gianyar, tidak terganggu. Sehingga pembangunan tetap dapat dilanjutkan. Pembangunan yang saat ini berjalan juga diorientasikan pada peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Gianyar merupakan pusat seni dan budaya. Banyak seniman Bali yang mengembangkan karyanya di Kabupaten Gianyar. Di samping itu, Gianyar juga merupakan tempat dimana banyak terdapat *cultural heritage*. Disadari oleh Bupati Gianyar, ini merupakan potensi besar yang dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Bali secara khusus dan ke Indonesia secara umum. Untuk hal tersebut pula, saat ini Gianyar tengah merevitalisasi secara serius, Lapangan Astina dengan anggaran kurang lebih 22 miliar yang bersumber dari APBD. Lapangan Astina selama ini berfungsi sebagai tempat pementasan seni dan budaya. Dengan dilakukannya revitalisasi, Lapangan Astina akan menjadi *stage* balai budaya sekaligus alun-alun dan taman kota Gianyar yang didukung dengan fasilitas pedestrian untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial serta budaya masyarakat Gianyar.

Dalam paparannya, Bupati Gianyar juga menjelaskan mengenai proses pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, seperti pasar Gianyar, fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit Sanjiwani dan Rumah Sakit Payangan serta tata kota berupa pembangunan Taman Darmagiri. Selain itu, untuk mempercepat roda perekonomian, 2 (dua) sarana dan prasarana transportasi tengah dan telah selesai dibangun oleh pemda setempat. Kedua jalur transportasi tersebut yaitu Jalan Tegenungan dan Jembatan Siangan-Lokasrana. Jalan Tegenungan akan menghubungkan desa Kemenuh dengan Desa/Kecamatan Sukawati dan juga akan ditata untuk menjadi tempat wisata. Durasi perjalanan akan dapat dipangkas separuhnya dengan jalur ini. Mengingat jalur tersebut terintegrasi dengan sejumlah objek wisata, kedepan pemerintah Kabupaten Gianyar juga berencana untuk menata obyek-obyek wisata yang tersebar di sejumlah titik. Sementara Jembatan Siangan-Lokasrana telah selesai dibangun dan dapat dilintasi masyarakat di awal tahun 2021. Pembangunan jembatan ini memfasilitasi mobilitas masyarakat yang sangat tinggi antar kedua kawasan sekaligus mengefesiensikan waktu yang ditempuh.

2) **Paparan tentang "Peran Diplomasi Parlemen dalam Mempercepat Pencapaian SDGs dan Pemulihan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah" oleh Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, MBA selaku Ketua Delegasi**

Setelah penyampaian sambutan dan paparan singkat mengenai potensi daerah Gianyar oleh Bupati, acara dilanjutkan dengan presentasi oleh Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, sebagai Ketua Delegasi, yang didahului dengan pengenalan masing-masing

anggota Delegasi. Putu Supadma Rudana memulai presentasi dengan memaparkan makna diplomasi parlemen yang dijalankan DPR sebagai bagian dari kebijakan diplomasi total Indonesia. Parlemen menjadi aktor diplomasi jalur kedua yang memperkuat diplomasi pemerintah. Tujuan BKSAP Day dijelaskan untuk membangun jembatan komunikasi eksekutif di daerah dengan DPR RI dalam kaitannya dengan peran dan fungsi diplomasi BKSAP di luar negeri. Wakil Ketua BKSAP tersebut menjelaskan bahwa Diplomasi Parlemen membawa misi kepentingan nasional di tingkat regional dan global melalui keterlibatan BKSAP DPR RI dalam *event-event* antar parlemen se-ASEAN, Asia, maupun jaringan parlemen dunia atau *Inter-Parliamentary Union (IPU)*.

Paradigma relasi dalam sistem internasional telah berubah seiring dengan semakin kompleksnya persoalan yang terjadi di tatanan regional maupun global. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam politik internasional. Beberapa aktor di luar negara seperti NGO, lembaga donor, lembaga pendidikan dan riset, pelaku ekonomi seperti *multinational company* memiliki peran penting, tanpa terkecuali parlemen. Kenyataan inilah yang mendorong semakin pentingnya perluasan diplomasi yang selama ini mengandalkan peran eksekutif. Diplomasi yang mengandalkan peran banyak pihak termasuk parlemen ini yang kemudian disebut sebagai *total diplomacy* atau *multi-track diplomacy*.

Diplomasi total dijalankan sesuai amanat konstitusi untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia serta turut serta dalam memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Fungsi diplomasi sebagaimana fungsi parlemen lainnya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi. Peran diplomasi parlemen dimandatkan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sejalan dengan fungsi diplomasi dalam kerangka representasi tersebut, maka BKSAP DPR RI dibentuk untuk menjembatani kepentingan nasional dan lokal dengan kepentingan nasional di tingkat global. Berkaitan dengan itu, Gianyar dipandang sebagai daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan di tingkat global. Gianyar merupakan pusat seni dan budaya yang juga sarat dengan nilai *cultural heritage*-nya. Ini merupakan sebuah potensi yang harus dioptimalkan untuk dapat digaungkan ke dunia internasional. Karena selain dapat meningkatkan sektor pariwisata di dalam negeri, hal tersebut juga dapat menjadi citra baik Indonesia di mata dunia, sebagai negara yang memiliki, menjaga dan melestarikan kearifan lokalnya. Dukungan infrastruktur yang terintegrasi dengan baik juga perlu mendapat perhatian khusus agar dapat menghubungkan titik-titik objek wisata agar mudah diakses oleh wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara.

Sebagai sentra seni dan budaya, dimana banyak seniman Bali mengembangkan kreatifitas dan karyanya, Kabupaten Gianyar dapat menjadi inspirasi bagi seniman-seniman dunia. Akan sangat menguntungkan bagi Indonesia bila karya-karya para seniman lokal ini dapat diperkenalkan ke *event-event* dunia. Hal ini dapat menjadi nilai plus kearifan lokal Indonesia yang bisa menjadi identitas katalisator pariwisata Gianyar.

Pengembangan pariwisata diharapkan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dimana terdapat keselarasan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur, fasilitas layanan publik, maupun pengembangan sektor pariwisata di Gianyar harus diupayakan sejalan dengan nilai-nilai SDGs yang salah satunya bersifat ramah lingkungan.

Putu Supadma Rudana menawarkan Gianyar untuk membangun jaringan internasional dalam rangka menjembatani kepentingan industrialisasi dan pengembangan konservasi budaya di Gianyar dengan para pihak di luar negeri. Tawaran tersebut antara lain melalui pembangunan *sister city* atau *sister region* antara Gianyar dengan suatu kota di luar negeri yang memiliki kesamaan visi dan kepentingan. Namun demikian, kearifan lokal tetap menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan apapun termasuk perencanaan industri dan perencanaan di sektor lainnya.

3) Sesi dialog diskusi dan tanya jawab

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang dimoderatori langsung oleh Ketua Delegasi, Putu Supadma Rudana. Sesi dialog ini didesain agar peserta aktif memberikan pertanyaan/pernyataan dan tanggapan kepada seluruh delegasi.

a) Pertanyaan/Pernyataan 1: Bapak I Made Gede Wisnu Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

Menambahkan informasi pencapaian Kabupaten Gianyar, terutama yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu *Prosperity*, *People*, dan *Planet*. Telah banyak dibangun sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, penghapusan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Kabupaten Gianyar memiliki Program TPS3M sebagai upaya untuk menyelesaikan sampah dari sumbernya, yaitu dari hulu, dengan filosofi “Desaku Bersih tanpa Mengotori Desa Lain”. Sinergitas antara Kepala Daerah dengan Para OPD berjalan dengan sangat baik, sehingga program-program daerah dapat berjalan dengan lancar pula.

Tanggapan Anggota BKSAP/Anggota Komisi VI : Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD)

Mengapresiasi penerapan SDGs yang telah dipraktekkan oleh Kabupaten Gianyar dan akan menggaungkannya, baik ke dalam negeri sebagai contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di wilayah Indonesia, maupun ke luar. Keberhasilan Kabupaten Gianyar membangun sistem *database* yang komprehensif dan bebas biaya juga akan disampaikan pada forum Parlemen Sedunia mengenai SDGs mendatang di Jakarta.

b) Pertanyaan/Pernyataan 2: Prof. I Wayan Dibia (Tokoh Masyarakat dan Seni Budaya)

Menambahkan informasi terkait potensi Gianyar sebagai Bumi Seni dimana kantong seni dan budaya tersebar di seluruh wilayah Gianyar. Pemkab telah melakukan revitalisasi

untuk menjaga keberlangsungan seni dan budaya di Gianyar namun semenjak pandemi aktivitas para seniman terhenti. Berharap pintu pariwisata dapat segera dibuka kembali untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan para seniman. Diharapkan melalui seni, para seniman dapat mengedukasi masyarakat umum untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Tanggapan Wakil Ketua BKSAP/Komisi VI : Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD)

Melihat perkembangan angka persebaran covid-19 yang mengalami penurunan dengan jumlah yang cukup signifikan, diharapkan Indonesia, khususnya Bali dapat segera pulih dari pandemi, sehingga pintu perbatasan dapat dibuka kembali dan wisatawan dapat berkunjung. Berkenaan dengan prinsip Trinita Karana yang memiliki nilai filosofis menjaga kelestarian lingkungan, pada dasarnya di masyarakat Bali, khususnya di Gianyar sudah dipraktikkan secara turun temurun. Namun demikian harus senantiasa diingatkan agar tidak ditinggalkan.

c) Pertanyaan/Pernyataan 2: I Wayan Tagel Winarta (Ketua DPRD)

Menyampaikan harapan agar Gianyar dapat senantiasa dipromosikan oleh BKSAP di fora internasional, meskipun sudah cukup dikenal. Lebih jauh, Gianyar berkeinginan agar BKSAP mampu membawa kegiatan-kegiatan nasional dan internasional dapat diselenggarakan dan diprioritaskan untuk dilangsungkan di Bali, khususnya Gianyar. Hal ini dikarenakan Bali sangat bergantung pada sektor wisata dan tidak begitu banyak memiliki sumber daya alam untuk menopang kehidupan ekonomi masyarakatnya, layaknya di daerah lain.

Tanggapan Wakil Ketua BKSAP/Komisi VI : Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD)

Menjelaskan bahwa BKSAP akan senantiasa berupaya menggaungkan potensi yang dimiliki Bali, khususnya Gianyar agar mendapat *spotlight* di dunia internasional. Baik untuk menarik masuk para investor dan wisatawan, maupun memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang bersifat global. Sehingga tidak menutup kemungkinan, Indonesia mampu menjadi *role model* dalam kancah internasional.

Tanggapan Anggota BKSAP/Komisi IV : Muslim, SH., MM (F-PD)

Menyebutkan bahwa dengan nilai adat yang telah menyatu dan menjadi keseharian dalam hidup masyarakat Gianyar, BKSAP optimis bahwa Gianyar dapat menjadi salah satu contoh Kabupaten terbaik di Indonesia yang dapat menjadi teladan bagi kabupaten lainnya. Dengan memperhatikan perkembangan yang signifikan atas turunnya kasus covid di Bali, DPRD akan berupaya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah dan mencari jalan keluar terbaik agar pintu pariwisata dapat segera dibuka kembali. Transparansi Bupati Gianyar dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam hal peningkatan kualitas fasilitas publik sangat diapresiasi.

Tanggapan Anggota BKSAP/Komisi IX: Arzeti Bilbina, SE., MAP (F-PKB)

Dijelaskan bahwa saat ini Komisi IX tengah fokus dengan *herd immunity*. Sementara kabar baiknya, tingkat persebaran vaksin di Provinsi Bali sudah mencapai 70%. Diharapkan, angka 100% dapat segera dicapai, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan covid-19 dan kehidupan masyarakat dapat dipulihkan kembali. Terkait transparansi yang dipraktikkan dalam pengelolaan pemerintahan daerah kabupaten Gianyar, terutama di sektor kesehatan, melalui Komisi IX Arzeti akan membawanya pada rapat kerja dengan mitra terkait, khususnya BPJS. Arzeti menilai sistem transparansi yang diterapkan Gianyar dapat menjadi salah satu contoh.

Tanggapan Anggota BKSAP/Komisi VIII: H. Hasani Bin Zuber, SIP (F-PKB)

Delegasi sangat mengapresiasi sistem *data base* Kabupaten Gianyar yang sangat baik, tertata, komprehensif dan detail. Suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi di antara umat beragam di Bali juga patut diapresiasi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan BKSAP SDGs *Day* di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada tanggal 27 September 2021 s.d. 29 September 2021 berjalan lancar dan sukses serta dapat terlaksana sesuai program acara yang telah ditentukan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Gianyar menyambut baik kegiatan BKSAP *Day* di daerah yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, civitas akademika dan masyarakat sehingga kegiatan BKSAP *Day* ini dapat memfasilitasi BKSAP untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah dan Civitas Akademika serta *Civil Society*
- 3) Pelaksanaan kegiatan BKSAP *Day* ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga kehadiran peserta dalam jumlah terbatas oleh perwakilan dari elemen Pemerintah Daerah, civitas akademika dan masyarakat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
- 4) Kegiatan BKSAP *Day* ini merupakan kunjungan pertama Delegasi BKSAP ke Pemerintah Kabupaten Gianyar sehingga paparan tentang BKSAP *Day* sangat membuka cakrawala berbagai kalangan di daerah tentang diplomasi parlemen oleh DPR RI dan juga berhasil mendorong diskusi yang dinamis.
- 5) Pada sesi diskusi, terjalin dialog yang konstruktif antara berbagai pihak di daerah dengan para anggota delegasi mengenai berbagai kepentingan di daerah yang akan difasilitasi tindak lanjutnya oleh para delegasi yang merupakan Anggota dari berbagai Komisi di DPR RI.
- 6) Delegasi BKSAP terdiri dari Anggota DPR RI dari berbagai Fraksi dan Komisi sehingga diskusi yang terjalin lebih luwes, produktif dan efektif dengan membahas berbagai isu yang beragam dalam suatu pertemuan

B. Saran

- 1) BKSAP DPR RI perlu lebih giat mensosialisasikan kinerjanya untuk membuka pandangan semua kalangan, tidak hanya pemerintah daerah dan instansi terkait, namun juga akademisi dan masyarakat pada umumnya, termasuk pelaku usaha dan kelompok-kelompok seni dan budaya.
- 2) Pelaksanaan BKSAP *Day* perlu terus memperbaharui tema dalam setiap kunjungan kerja agar sesuai dengan konteks daerah yang sedang dihadapi dan menghasilkan output yang maksimal.
- 3) Perlu terus dilaksanakan dalam agenda kegiatan BKSAP karena terbukti efektif sebagai sarana untuk diseminasi informasi dan hasil-hasil diplomasi parlemen sehingga

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Delegasi dan transparansi ke publik. Delegasi mengharapkan agar Laporan ini bermanfaat sebagai referensi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Laporan ini juga dilengkapi dengan informasi tambahan sebagai lampiran berupa:

- Liputan media cetak/media elektronik
- Dokumentasi foto selama kegiatan
- Makalah presentasi

Jakarta, 30 September 2021

a.n Delegasi
Ketua Delegasi



Putu Supadma Rudana, MBA

A-563



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Program Gianyar Patut Dicontoh Daerah Lain

27-09-2021 / B.K.S.A.P.



Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim saat menghadiri BKSAP SDGs Day bersama Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra beserta jajaran, di Gianyar, Bali, Senin (27/9/2021). Foto: Nadia/Man

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim mengaku bangga dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan program keterbukaan informasi bagi publik terhadap pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pemkab Gianyar. Bahkan ia mengapresiasi keberanian Pemkab Gianyar untuk menolak menggunakan BPJS Kesehatan bagi rakyatnya. Menurutnya program-program Pemkab Gianyar bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Light

“(Gianyar) Termasuk satu kabupaten yang menolak untuk ikut BPJS. Artinya kenapa, karena menurut mereka kalau ikut BPJS ini pemerintahnya rugi, bahkan sekitar Rp150 miliar per tahun, bahkan (Pemkab Gianyar) bisa memformulasikan sendiri. Ini saya pikir juga menjadi masukan untuk kita membantu pada pemerintah, artinya dengan sendirinya mereka juga membantu pemerintah,” tuturnya saat menghadiri BKSAP SDGs Day bersama Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra beserta jajaran, di Gianyar, Bali, Senin (27/9/2021).

Lebih lanjut dalam BKSAP SDGs Day bertema ‘Peran Strategis Diplomasi Parlemen Dalam Mendorong Percepatan SDGs dan Pemulihan Ekonomi berbasis Keunggulan Daerah’ itu, Muslim mengatakan dari sisi misi diplomasi tugas BKSAP saat ini adalah membantu membangkitkan wisata dan ekonomi yang berada di Pulau Dewata. Mengingat Bali merupakan pintu masuknya pariwisata dunia khususnya wisatawan mancanegara.

“Saya yakin (di Bali) sudah mulai kelihatan geliat ekonominya. Tentu pemerintah harus berhati-hati juga, mudah-mudahan dengan prokes yang diterapkan Pemerintah Bali ini juga, semakin hari semakin terbuka buat wisatawan mancanegara. Kalau wisatawan lokal saya pikir hari ini sudah berjalan, kalau wisatawan mancanegara kan belum. Dan saya yakin saya optimis, mudah-mudahan ke depannya terus bisa kita dorong untuk segera dibuka akses dalam konteks pariwisata yang ada di Gianyar khususnya, dan umumnya Bali,” katanya.

Muslim menilai Gianyar dapat dijadikan contoh dari berbagai aspek, dimulai dari keterbukaan informasi publik, kemudahan mengakses data publik, hingga sinergi bupati dan seluruh perangkat daerahnya. “Dan juga yang paling menarik lagi ternyata seluruh sistem yang dibangun di Gianyar ini dikelola oleh anak-anak milenial yang juga tanpa biaya, mereka hanya membayar Rp5 juta satu bulan, tetapi menghasilkan satu sistem yang begitu bagus untuk menjadi contoh buat teman-teman di kabupaten lain. (Upaya) ini bisa jadi contoh, jadi banyak sekali yang bisa kita dapat di Gianyar ini,” tandas politisi Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR RI Arzetti Bilbina menyatakan persetujuannya atas ketidakikutsertaan Gianyar di dalam program BPJS Kesehatan. Selaku Anggota Komisi IX DPR RI, Arzetti juga mengapresiasi langkah Bupati Gianyar tersebut, mengingat dalam sejumlah rapat kerja BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, pihaknya seringkali menanyakan transparansi anggaran BPJS Kesehatan.

“Jadi kalau Bupati melakukan terobosan untuk keluar dari BPJS, saya mengapresiasi yang sangat tinggi. Pada saat kami raker dengan BPJS, kami akan bawa aspirasi ini dan kami akan teruskan, sehingga kemudian harapan-harapan dari Gianyar akan kami sinergikan dengan Komisi kami masing-masing. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada Bupati dan jajaran dan DPRD yang luar biasa selalu bersinergi baik dan menjadi salah satu contoh juga untuk eksekutif dan legislatif menjadi satu kesatuan, dan yang di pusat untuk mengawal dan peduli agar Gianyar ini menjadi lebih baik,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. (ndy/sf)

Light









DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan Daerah Harus Linear dengan SGDs

27-09-2021 / B.K.S.A.P.



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana (kanan) saat BKSAP SDGs Day di Gianyar, Bali, Senin (27/9/2021). Foto: Nadia/Man

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana berharap, program-program Kabupaten Gianyar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terus berjalan sejajar dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengingat Kabupaten Gianyar memiliki potensi yang besar di segala aspek daerah dan juga kearifan lokal yang ada.

Putu Supadma mengatakan hal tersebut dalam BKSAP SDGs Day dengan tema "Peran Strategis Diplomasi Parlemen Dalam Mendorong Percepatan SDGs dan Pemulihan Ekonomi berbasis Keunggulan Daerah" bersama Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, di Gianyar, Bali, Senin (27/9/2021). Turut Hadir dalam kegiatan BKSAP SDGs Day di Gianyar ini di antaranya Anggota BKSAP DPR RI Muslim (F-PD), Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Arzetti Bilbina (F-PKB), dan Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP).

"Kita tentu berharap dengan adanya ini, program-program di daerah dalam hal ini RPJMD kabupaten maupun kota terus *inline* (linear) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kita melihat Kabupaten Gianyar dengan segala potensinya, dengan berbagai aspeknya terus melakukan komitmen dalam melakukan agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs," apresiasi Putu Supadma.

Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini, terdapat tiga poin penting menyangkut *goals* SDGs, yakni *prosperity* yaitu kesejahteraan masyarakat, kedua adalah *people*, yakni bagaimana masyarakat mendapatkan info untuk terlibat mendapatkan manfaat dalam berbagai hal, seperti kesehatan, tidak adanya kemiskinan dan lainnya. Dan yang terakhir terkait dengan lingkungan atau *environment*, yang kesemuanya menurut Putu Supadma sudah diterapkan di Gianyar.

"Hal (yang diterapkan di Gianyar) ini tidak hanya akan kita suarakan, tapi juga menjadi contoh nyata dalam penerapan SDGs di berbagai daerah kabupaten maupun kota. Mereka (Pemerintah Kabupaten Gianyar) memiliki skor dan tolok ukurnya dan juga pencapaiannya tentu menjadi inspirasi bagi daerah lainnya," puji Putu Supadma.

Diketahui Gianyar menjadi pusat pariwisata, seni budaya dan berbagai kerajinan di Bali. Sehingga dengan tupoksinya, BKSAP akan menggaungkan berbagai potensi nasional dan kearifan lokal Indonesia. "Tentu kita harapkan ke depannya BKSAP akan terus memperjuangkan, mengkomunikasikan, dan menggaungkan segala potensi yang dimiliki Indonesia dan memperjuangkan segala kepentingan nasional kita, untuk diperjuangkan ke seluruh penjuru dunia," tandas legislator dapil Bali itu.

Selanjutnya, Putu Supadma juga melihat penerapan *goals* SDGs di Gianyar, yang berkaitan dengan environment atau lingkungan, dimulai dari pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat, hingga tingkat kemiskinannya. Menurutnya, yang terpenting adalah kebijakan pemerintah dapat memberikan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakatnya, sebagai salah satu penerapan SDGs.

"Yang terpenting bagaimana kebijakan pemerintah itu juga memberikan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakatnya, dan ini menjadi poin penting dan tentu dalam penerapan SDGs kebijakan daerah. Kalau sudah *inline*, tentu harapannya adalah ke depan bagaimana masyarakat disejahterakan dan kita yakini bahwa penerapan SDGs Indonesia, khususnya di Provinsi Bali sudah menjadi hal utama dan sudah menjadi perilaku daripada masyarakatnya. Dan hal ini yang akan kita terus gaungkan," komitmen Putu Supadma.



BKSAP SDGs DAY

**"Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam
Mendorong Percepatan SDGs dan Pemulihan
Ekonomi berbasis Unggulan Daerah"**

Gianyar - Bali

28 September 2021 s.d. 30 September 2021

Yang saya hormati Bupati Gianyar

Yang saya hormati Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten Pembangunan, Para Kepala OPD, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Gianyar

Dan yang saya hormati civitas akademika, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat yang hadir

Om Swastiastu, Semeton Sinamian.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Saya mewakili delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Secara khusus, saya ucapkan terimakasih kepada Bupati Gianyar, Bapak I Made Agus Mahayastra, STP.Par.,MAP,. Meskipun dalam masa pandemi, saya bersyukur bisa berjunjung ke Gianyar untuk bertemu dan berdialog langsung terutama terkait pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sebelum saya memulai diskusi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua BKSAP dan Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Bali. Pada kesempatan ini, saya hadir bersama rekan-rekan saya yaitu:

(Bapak Putu Supadma memperkenalkan seluruh anggota delegasi dengan menyebutkan nama, fraksi, komisi, serta asal daerah pemilihan).

Terimakasih kepada Bapak/Ibu Anggota BKSAP yang telah memperkenalkan diri.

Hadirin yang saya hormati,

(Slide-2) KONSEP DIPLOMASI TOTAL (MULTITRACK DIPLOMACY)

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pergeseran yang signifikan dimana relasi antar bangsa semakin intensif seiring dengan kemajuan dan inovasi teknologi. Selain itu, mobilitas manusia, arus barang dan informasi berjalan sangat cepat sehingga menimbulkan interdependensi antar negara.

Persoalan dunia juga semakin terkoneksi sehingga satu negara tidak lagi mampu menanganinya sendiri seperti yang sedang dihadapi saat ini yaitu pandemi Covid-19, isu pemanasan global, kejahatan transnasional, dan krisis ekonomi.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, negara (eksekutif) tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam pergaulan internasional. Beberapa aktor di luar negara seperti NGO, lembaga donor, lembaga pendidikan, pelaku ekonomi seperti perusahaan multi-national serta pelaku budaya memiliki

peran penting. Dan tentunya, parlemen juga memainkan peran yang semakin strategis dalam dunia internasional.

Kenyataan inilah yang mendorong semakin pentingnya perluasan diplomasi yang selama ini hanya mengandalkan peran eksekutif. Diplomasi yang mengandalkan peran banyak pihak termasuk parlemen ini dikenal sebagai *total diplomacy* atau *multi-track diplomacy*.

Diplomasi multi-jalur merupakan bentuk upaya diplomasi total dalam memenangkan persaingan global. Diplomasi total dijalankan sesuai amanat konstitusi untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia serta turut serta dalam memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dalam kerangka ini, istilah diplomasi parlemen semakin penting.

FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN (Tidak masuk di slide)

Hadirin yang saya hormati,

Selama ini fungsi yang melekat dengan DPR RI terdiri dari tiga yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun ada dua fungsi lain yang belum banyak diketahui publik yaitu fungsi representasi dan fungsi diplomasi. Fungsi ini menegaskan konsep diplomasi total bahwa selain eksekutif, legislatif yaitu DPR juga mempunyai mandat untuk melaksanakan diplomasi secara bilateral, regional dan multilateral.

Peran diplomasi parlemen didasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yaitu MPR,

DPR, DPD, dan DPRD. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 219 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan upaya diplomasi parlemen, kemudian dibentuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai *focal point* diplomasi DPR RI. Jadi tugas kami di BKSAP adalah:

- Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara lain.
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI tentang masalah kerja sama antar parlemen.
- Memperjuangkan dan mempromosikan kepentingan nasional Indonesia.

[Slide-4] LINGKUP DIPLOMASI PARLEMEN

Hadirin yang saya hormati,

BKSAP melaksanakan diplomasi parlemen secara bilateral, regional dan multilateral. Diplomasi secara bilateral dilakukan melalui pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) untuk

meningkatkan hubungan bilateral antar negara. Pada periode ini telah dibentuk GKSBB dengan lebih dari 100 negara sahabat.

Kemudian diplomasi pada tingkat regional dilakukan melalui keterlibatan DPR RI dalam organisasi dan forum-forum tingkat regional seperti di Majelis Parlemen ASEAN/ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Forum Parlemen Asia Pasifik /Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), serta Majelis Parlemen Asia/ Asia Parliamentary Assembly (APA).

Sedangkan diplomasi secara multilateral dilakukan melalui partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi antar parlemen tingkat global/ Inter Parliamentary Union (IPU), Perkumpulan Parlemen Negara-negara Islam/ Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)), serta organisasi parlemen global yang konsen terhadap isu korupsi yakni Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Fungsi diplomasi parlemen yang kami lakukan adalah untuk menjembatani kepentingan daerah dan kepentingan nasional pada tingkat global.

[Slide-6] MAKSUD BKSAP SDGs DAY

Hadirin yang saya hormati,

Kunjungan kami ke Gianyar ini adalah dalam rangka suatu kegiatan yang dinamakan BKSAP Day atau saat ini berupa BKSAP SDGs Day. BKSAP Day merupakan agenda yang dilaksanakan secara reguler sejak periode DPR RI 2014-2019 dan berlanjut hingga periode 2019-2024. Agenda ini bertujuan

untuk mensosialisasikan dan berdialog secara konstruktif terkait peran diplomasi parlemen dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global.

Maksud BKSAP Day yang kami lakukan adalah untuk melakukan 1) Diseminasi fungsi, peran, dan tugas BKSAP DPR RI; 2) Menyerap aspirasi dan ide-ide inovatif dari pemerintah daerah dan berbagai pihak mengenai diplomasi parlemen; 3) Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk penguatan diplomasi parlemen.

[Slide-7] TEMA BKSAP SDGs DAY DI GIANYAR

Hadirin yang saya hormati,

Tema yang kita usung dalam kegiatan BKSAP Day di Gianyar ini adalah tentang "*Peran Diplomasi Parlemen dalam Mendorong Pencapaian SDGs dan Pemulihan Ekonomi Berbasis Keunggulan Daerah*". Pemilihan tema ini tentunya didasarkan pada relevansi dengan rencana pembangunan nasional tentang percepatan SDGs dan juga prioritas pemerintah saat ini yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Tema ini tentunya juga sangat relevan dengan kondisi daerah termasuk di Gianyar yang juga sedang sama-sama berjuang mempercepat pembangunan dan memulihkan perekonomian.

[Slide-8] APA DAN MENGAPA SDGs?

Hadirin yang saya hormati,

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan penyelamatan lingkungan (3P: *People, Prosperity, Planet*) yang ditargetkan pada 2030. Agenda global ini telah diadopsi oleh 193 negara termasuk Indonesia.

Kita telah meratifikasi target pembangunan global ini melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut tentu menjadi landasan pencapaian SDGs di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Yang menarik dari implementasi SDGs ini adalah meskipun Mandat SDGs ada di pemerintah pusat, tapi 70% kewenangan dalam implementasi SDGs ada di pemerintah daerah. Karena itu, pembangunan di daerah harus sejalan dengan pencapaian 17 target SDGs yang sudah dicanangkan.

[Slide-9] 17 TARGET SDGs

Hadirin yang saya hormati,

Bisa kita lihat 17 target SDGs yang ada sangat komprehensif dan mencakup semua sektor mulai dari yang lintas sektor seperti pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan, serta kemitraan. Beberapa target SDGs juga sangat spesifik menyoasar sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, ketenagakerjaan, infrastruktur,

energi dan lingkungan serta akses terhadap sanitasi dan air bersih.

[Slide-10] STRATEGI DAN PERAN DIPLOMASI PARLEMEN DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN SDGs

Hadirin yang saya hormati,

Dalam upaya mempercepat pencapaian SDGs tersebut, kami mendorong sepenuhnya integrasi target SDGs ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN. Kami berharap bahwa integrasi SDGs ini sudah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gianyar.

Selain itu, DPR RI tentunya sangat siap dalam memberikan dukungan kelembagaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap implementasi dan pencapaian target SDGs. Di internal DPR sendiri, kami telah melakukan penguatan kelembagaan melalui penerapan teknologi dengan membangun "Portal SDGs" DPR RI. Ini menjadi pusat informasi SDGs DPR RI untuk mendukung pengambilan keputusan, penganggaran, dan pengawasan SDGs.

Pada tingkat global, DPR RI juga sangat aktif dalam penanganan SDGs. Pada akhir September 2021 ini, DPR RI bekerjasama dengan organisasi parlemen dunia atau *International Parliamentary Union (IPU)* akan mengadakan pertemuan antar parlemen yang khusus membahas SDGs yaitu *First Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs*. Kami juga turut serta dalam penyusunan laporan kemajuan

SDGs nasional melalui *Voluntary National Review (VNR)* yang dilaporkan ke Badan Ekonomi Sosial PBB bulan Juli lalu. Baru-baru ini, kami juga mendukung penerapan teknologi dalam SDGs dalam sidang umum Parlemen ASEAN (*AIPA General Assembly*) ke 142.

[Slide-11] MENGAPA PEMULIHAN EKONOMI?

Hadirin yang saya hormati,

Seperti yang kita ketahui bersama, ekonomi dunia dan tentunya ekonomi Indonesia mengalami pelambatan akibat pandemi ini. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi menjadi agenda nasional saat ini.

Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuak dengan adanya pandemi Covid-19. Indonesia dan tentunya Bali juga merasakan dampak pandemi pada sektor pariwisata. Indonesia tidak sendiri dalam merasakan dampak pandemi di sektor pariwisata ini karena hampir seluruh negara didunia mengalami hal yang serupa.

Rilis terbaru dari *UN World Tourism Organization (UNWTO)* dan *UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyebutkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar US\$2,4 triliun pada tahun 2021 dan hilangnya pendapatan pada sektor pariwisata sebesar US \$ 948 miliar pada periode 2020-2021.

Dari sisi kawasan, Asia dan Pasifik diperkirakan masih mengalami penurunan GDP sektor pariwisata sebanyak 11,9%,

Afrika Timur dan Afrika Utara masing-masing sebesar 9,3% dan 7,5%. Sedangkan Asia Tenggara sebesar 8,4%. Penurunan ekonomi pariwisata ini tentu diakibatkan oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan aktivitas pariwisata.

Terganggunya pariwisata ini tentunya menyebabkan pelambatan pertumbuhan pada sektor lain seperti perekonomian, pengurangan tenaga kerja, pengurangan pendapatan masyarakat. Kondisi ini secara umum sangat terasa di Bali yang menggantungkan diri pada sektor pariwisata.

[Slide-12] STRATEGI DAN PERAN DIPLOMASI DALAM PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH

Hadirin yang saya hormati,

Lalu selanjutnya, bagaimana bentuk dukungan parlemen terhadap pemulihan ekonomi khususnya pada tingkat daerah?

Pertama, kami mendorong adanya prioritas pada sektor-sektor unggulan daerah yang bisa menjadi katalisator pemulihan ekonomi seperti sektor pariwisata, pertanian, perkebunan atau sektor unggulan lainnya. Bentuk prioritas ini dapat dilakukan dengan alokasi anggaran yang lebih besar, pengerahan sumber daya yang lebih besar, dan aktivitas yang lebih massif.

Kedua, melalui strategi *local branding* yaitu mengoptimalkan kearifan lokal untuk *local brand* dan *national brand* sebagai nilai strategis dalam diplomasi parlemen. Ini sangat relevan

untuk digunakan di daerah seperti di Gianyar. Misal pada sektor-sektor unggulan seperti pariwisata. Kita dapat membranding pariwisata alam, produk pertanian organik dll. Ini tentu akan menjadi modal DPR RI dalam melakukan diplomasi di tingkat regional maupun global. Kekhasan ini yang bisa kita angkat dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Ketiga, strategi yang bisa kita lakukan dan fasilitasi adalah kolaborasi lintas negara antara kabupaten di Indonesia dengan *region/municipal government* di luar negeri. BKSAP DPR RI dapat memfasilitasi kolaborasi tingkat internasional melalui berbagai skema seperti *sister city* atau *sister regency* antara kabupaten/kota di Indonesia dengan kota di luar negeri yang memiliki karakteristik sama.

PENUTUP

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa dengan banyaknya tantangan yang negara kita hadapi, upaya-upaya percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi membutuhkan kerja dari banyak pihak tidak hanya eksekutif. Parlemen, dalam hal ini BKSAP, berkomitmen untuk terus menggaungkan kepentingan lokal dan nasional di panggung internasional.

BKSAP akan terus melakukan sinergi untuk menjembatani kepentingan daerah di tingkat global dan berusaha hadir memecahkan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. Secara spesifik, BKSAP juga sangat mendorong upaya-upaya percepatan pembangunan berkelanjutan dan

pemulihan ekonomi melalui lima fungsi yang melekat yaitu legislasi, *budgeting*, pengawasan, representasi dan diplomasi.

Demikian dari saya, selanjutnya kita dapat berdialog lebih lanjut dengan rekan-rekan Anggota BKSAP yang hadir disini yang kebetulan sangat komplit mewakili berbagai komisi di DPR RI.

Terima kasih.

Matur Suksma.

Om Shanti Shanti Shanti Om.